

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang perannya sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia, dengan jumlah pelaku usaha mikro yang diperkirakan sebagian besar bergerak di sektor informal (Hartono & Deny Dwi Hartono, 2014.) Di samping itu, keberadaan dari UMKM itu sendiri merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Pemberdayaan UMKM telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Salah satu faktor penting dalam perkembangan dan penopang perekonomian Indonesia adalah keberadaan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah sekarang ini mulai memberikan perhatian yang cukup besar pada perkembangan UMKM. Tidak hanya sebatas jumlah UMKM yang mendominasi di Indonesia, tetapi UMKM dapat lebih bertahan dari terpaan krisis global (Purwanti, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 20 tahun 2008, usaha mikro diartikan sebagai entitas produksi milik individu atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria undang-undang. Usaha kecil adalah bisnis yang tidak termasuk anak perusahaan perusahaan menengah atau besar, serta tidak dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut, melainkan merupakan entitas mandiri dan produktif sesuai hukum yang berlaku (Hartono, G. S., dkk, 2023).



Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun terakhir ini semakin luar biasa, termasuk salah satunya adalah sistem pembayaran. Bank Indonesia sebagai regulator di bidang moneter mempunyai visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang salah satunya menyatakan "mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan*. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Bank Indonesia mewajibkan sistem pembayaran berbasis *QR Code* yang selama ini berdiri sendiri-sendiri, berbeda-beda antar Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), mulai awal tahun 2020 harus menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) (Bank Indonesia, 2019).

Salah satu alasan Bank Indonesia mewajibkan penggunaan QRIS kepada semua PJSP, berbasis *QR Code* adalah untuk mewujudkan standarisasi penggunaan *QR Code* sebagai sistem pembayaran sehingga tercipta efisiensi transaksi, memajukan UMKM, mempercepat inklusi keuangan, yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembayaran berbasis *QR Code* ada dua jenis yaitu statis dan dinamis. Pembayaran dengan *QR Code* jenis statis sangat cocok untuk UMKM karena tidak memerlukan investasi *Electronic Data Capture (EDC)* melainkan hanya berupa stiker saja yang cukup ditempel di tempat yang mudah di *scan* oleh *customer*. Keduanya sama sama memberikan kemudahan bagi *merchant* ataupun *customer* (Bank Indonesia, 2019b).



Implementasi QRIS dalam pembayaran pajak bagi UMKM diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat utama:

- **Kemudahan Transaksi:** QRIS memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara cepat dan mudah hanya dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi pembayaran di ponsel.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Transaksi melalui QRIS dapat tercatat secara otomatis dan transparan, sehingga mempermudah pelacakan pembayaran dan audit oleh pihak berwenang. Hal ini juga membantu mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan manual.
- **Inklusi Keuangan:** Implementasi QRIS mendukung inklusi keuangan dengan mendorong penggunaan layanan keuangan digital di kalangan UMKM. Hal ini dapat membuka akses UMKM terhadap berbagai layanan keuangan lainnya, seperti pinjaman dan asuransi.
- **Efisiensi Operasional:** Penggunaan QRIS dapat mengurangi biaya operasional yang berkaitan dengan pengelolaan pembayaran tunai dan administrasi perpajakan. UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka tanpa terbebani oleh prosedur pembayaran pajak yang rumit.
- **Meningkatkan Kepatuhan Pajak:** Dengan proses yang lebih sederhana dan transparan, diharapkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM akan meningkat. Ini pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak negara yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis implementasi pembayaran pajak menggunakan QRIS. Berdasarkan hasil penelitian (Riani B. & Seryu U 2022) mengungkapkan bahwa PPh final UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun saat ini kontribusinya masih rendah karena pelaku UMKM tidak patuh dalam membayar pajak, bukan karena mereka



menolak tetapi karena kompleksitas administrasi perpajakan. Solusi yang diusulkan adalah memanfaatkan QRIS untuk otomatisasi pemotongan pajak UMKM, memungkinkan kontribusi pajak mereka langsung masuk ke kas negara dengan lebih efisien.

Berdasarkan hasil penelitian (Santika Alis dkk, 2022) mengungkapkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa beberapa pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya telah menerapkan sistem pembayaran QRIS. QRIS membantu UMKM dalam proses transaksi dengan lebih mudah dan praktis. Pelaku UMKM memiliki persepsi positif terhadap QRIS, didorong oleh manfaat yang dirasakan, kemudahan penggunaan, serta risiko yang dianggap rendah.

Berdasarkan hasil penelitian (Fanny Nurhaliza dkk, 2023) mengungkapkan bahwa penerapan QRIS memberikan dampak positif signifikan pada transaksi bisnis digital UMKM di Indonesia. QRIS memfasilitasi transaksi non-tunai yang meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pembayaran elektronik, serta membantu UMKM meningkatkan pendapatan sehari-hari. Meskipun demikian, tantangan seperti tingginya tingkat diskon perdagangan (MDR) dan keterbatasan infrastruktur TI perlu diatasi untuk memperluas adopsi QRIS di kalangan UMKM secara lebih luas dan berkelanjutan.

Peneliti memilih tingkat adopsi teknologi QRIS oleh UMKM, kemudahan penggunaan QRIS, dan efisiensi pajak adalah untuk mengetahui pandangan pelaku UMKM terkait penggunaan QRIS yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Peneliti



persepsi pandangan dari pelaku UMKM karena munculnya berbagai kerugian dirasakan oleh pelaku UMKM yang menggunakan QRIS. Seperti biaya

penggunaan QRIS sebesar 0,1% sampai 0,2% yang harus ditanggung oleh pedagang atau *merchant* dan kasus penipuan terhadap *merchant* dengan memanipulasi bukti transaksi. Maka dari itu, peneliti berpikir perlu untuk memperhatikan pandangan dari pelaku UMKM agar perkembangan teknologi pembayaran dapat memberikan berbagai keunggulan.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini dilakukan dengan judul :
“Impelentasi Pembayaran Pajak Menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* Terhadap UMKM”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat adopsi teknologi QRIS berpengaruh terhadap pengelolaan pembayaran pajak?
2. Apakah kemudahan penggunaan teknologi QRIS berpengaruh terhadap pengelolaan pembayaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat adopsi teknologi QRIS terhadap pengelolaan pembayaran pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan teknologi QRIS terhadap pengelolaan pembayaran pajak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.



1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis skripsi ini adalah untuk memperkaya pemahaman tentang penerapan teknologi QRIS dalam sistem pembayaran pajak, khususnya bagi UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori sistem pembayaran digital, kepatuhan pajak, serta pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari skripsi ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah, pelaku UMKM, dan pihak terkait dalam mempermudah dan mendorong implementasi pembayaran pajak melalui QRIS. Selain itu, penelitian ini dapat membantu UMKM dalam memahami cara yang lebih efisien dan praktis untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, serta meningkatkan kepatuhan pajak melalui penggunaan teknologi digital.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah tingkat adopsi teknologi QRIS oleh UMKM, kemudahan penggunaan QRIS, dan efisiensi pajak.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN



Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan yang digunakan dalam menyusun penelitian yang diperoleh melalui literatur dan studi pustaka. Teori yang dimaksud antara lain tingkat adopsi teknologi QRIS oleh UMKM, kemudahan penggunaan QRIS, dan efisiensi pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai hasil dan pembahasan analisis tingkat adopsi teknologi QRIS oleh UMKM, kemudahan penggunaan QRIS, dan efisiensi pajak.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian dari hasil penelitian yang telah disusun.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah integrasi berbagai kode QR dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) ke dalam satu standar. Didesain oleh industri pembayaran dan Bank Indonesia, QRIS memastikan transaksi dengan kode QR lebih praktis, cepat, dan aman. Semua PJSP yang ingin menggunakan kode QR pembayaran harus menerapkan QRIS (Bank Indonesia, 2020).

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019, QRIS memungkinkan berbagai aplikasi pembayaran digital dari berbagai penyedia layanan (seperti GoPay, OVO, DANA, LinkAja, dan bank) untuk saling terhubung. Ini berarti konsumen hanya perlu satu jenis *QR code* untuk membayar, terlepas dari aplikasi yang digunakan (Bank Indonesia, 2019).

Kode QR adalah jenis kode batang dua dimensi yang dapat menyimpan informasi dalam bentuk data digital. Kode ini awalnya dikembangkan di Jepang oleh perusahaan Denso Wave pada tahun 1994 untuk melacak suku cadang kendaraan.

Kode QR terdiri dari pola hitam dan putih yang dapat dibaca oleh perangkat pemindai,

kamera ponsel atau pemindai khusus (Rouillard, 2008).



Saat ini Kode QR telah banyak dimanfaatkan melalui aplikasi *QR Code Reader* dan *QR Code Generator*, yang memungkinkan seseorang dengan mudah membuat informasi dalam format kode QR dan mengakses informasi yang diinginkan hanya dengan memndainya menggunakan kamera ponsel (Anastasia et al, 2010).

Metode Transaksi Sebelum QRIS	Metode Transaksi Sesudah QRIS
Sebelum QRIS, metode transaksi yang umum digunakan di Indonesia mencakup uang tunai, transfer bank, kartu debit/kredit, dan <i>e-wallet</i> , yang masing-masing memiliki sistem berbeda. QRIS kemudian menyederhanakan proses pembayaran dengan mengintegrasikan berbagai metode ini menjadi satu standar yang lebih mudah dan praktis.	Setelah QRIS diterapkan, transaksi menjadi lebih mudah dengan satu kode QR terstandarisasi, memudahkan pembayaran cepat dan aman melalui berbagai <i>e-wallet</i> atau <i>m-banking</i> di berbagai <i>merchant</i> . Cukup menyiapkan satu kode QR di tokonya yang dapat di <i>scan</i> oleh mahasiswa menggunakan berbagai aplikasi pembayaran di <i>smartphone</i> mereka.

Tabel 2. 1. Perbedaan Transaksi Sebelum dan Sesudah QRIS

2.1.2. Perkembangan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

Pembayaran digital mengalami pertumbuhan yang signifikan, terbukti dari melejitnya penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai metode transaksi yang mencapai 48 juta pada Maret 2024. Selain itu, jumlah *merchant* yang mengadopsi QRIS juga mencapai 32 juta, dengan mayoritas di antaranya an pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Adi, 2024).



QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) telah mengalami perkembangan pesat sejak diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. Standar ini dibuat untuk menyederhanakan transaksi non-tunai melalui penggunaan satu jenis *QR code* yang dapat diakses oleh semua aplikasi pembayaran digital. Awalnya, QRIS dirancang untuk mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memudahkan mereka beralih ke metode pembayaran digital dengan biaya terjangkau. Hingga 2023, QRIS berhasil mengintegrasikan jutaan *merchant*, mayoritas dari UMKM, yang mendorong inklusi keuangan di berbagai wilayah Indonesia.

2.1.3. Jenis Pembayaran Menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

Bank Indonesia menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis pembayaran dalam menggunakan QRIS, yaitu:

1. *Merchant Presented Mode* (MPM) Statis

Merchant Presented Mode Statis merupakan metode pembayaran QRIS di mana merchant menggunakan *QR code* tetap yang dicetak dan dipasang di tempat usaha. Konsumen cukup memindai kode tersebut dan memasukkan nominal pembayaran secara manual. Mode ini sangat ideal bagi UMKM karena tidak memerlukan perangkat tambahan atau integrasi sistem yang kompleks, sehingga menekan biaya operasional. Sifatnya yang statis mempermudah penggunaan dalam transaksi langsung di lokasi fisik, namun kurang fleksibel dibanding QR dinamis yang lebih cocok untuk volume



transaksi tinggi atau penjualan daring. Meski sederhana, mode ini efektif untuk adopsi pembayaran digital skala kecil.

2. *Merchant Presented Mode* (MPM) Dinamis

Merchant Presented Mode Dinamis adalah metode pembayaran dalam sistem QRIS yang memungkinkan merchant menghasilkan *QR code* unik untuk setiap transaksi, meningkatkan keamanan karena setiap kode hanya berlaku sekali. Saat konsumen memindai *QR code*, nominal pembayaran terisi otomatis, mengurangi risiko kesalahan. Metode ini sangat cocok untuk *merchant* dengan volume transaksi tinggi, seperti restoran, meskipun memerlukan sistem atau perangkat untuk menghasilkan *QR code* secara otomatis. Dengan demikian, mode ini menawarkan solusi yang lebih aman dan efisien bagi *merchant* serta kenyamanan bagi konsumen dalam melakukan pembayaran.

3. *Customer Presented Mode* (CPM)

Customer Presented Mode adalah metode pembayaran dalam sistem QRIS di mana konsumen menghasilkan *QR code* untuk melakukan pembayaran. Pelanggan menggunakan aplikasi pembayaran di ponsel mereka untuk membuat *QR code* dengan jumlah yang ingin dibayar, dan *merchant* memindai kode tersebut untuk memproses transaksi. Mode ini menawarkan fleksibilitas untuk berbagai situasi dan meningkatkan keamanan dengan *QR code* unik untuk setiap transaksi, sehingga memberikan kenyamanan dan kontrol lebih bagi konsumen dalam proses pembayaran.

2.1.4 Manfaat Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)



Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) membawa manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi konsumen, QRIS

menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi hanya dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi pembayaran digital yang mereka pilih. Ini mengurangi kebutuhan membawa uang tunai atau kartu, meningkatkan kenyamanan, dan mengurangi risiko kehilangan atau pencurian uang tunai. Bagi pelaku usaha, terutama UMKM, QRIS menyederhanakan proses pembayaran dan meningkatkan efisiensi operasional. Transaksi yang tercatat secara otomatis memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pengelolaan pembayaran tunai.

Selain itu, QRIS mendukung inklusi keuangan dengan memudahkan akses layanan pembayaran digital bagi individu dan UMKM yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Ini membantu pelaku usaha kecil untuk berpartisipasi dalam ekosistem digital, memperluas pasar mereka, dan meningkatkan pendapatan. Penggunaan QRIS juga mendukung program pemerintah dalam digitalisasi ekonomi dan peningkatan inklusi keuangan, sekaligus menawarkan keamanan transaksi yang lebih baik melalui teknologi enkripsi. Di masa pandemi COVID-19, QRIS menjadi solusi penting untuk pembayaran tanpa kontak fisik, membantu mengurangi risiko penularan virus. Secara keseluruhan, QRIS memberikan kontribusi besar dalam transformasi digital dan inklusi keuangan di Indonesia.

Bank Indonesia menuliskan, ada beberapa manfaat dari standarisasi *QR code* dengan QRIS, yaitu:



agi user aplikasi pembayaran

udah dan praktis

2. Mengurangi risiko penipuan
3. Transaksi yang cepat
4. Pengurangan penggunaan uang tunai
- b. Bagi *Merchant*
 1. Seluruh transaksi tercatat otomatis
 2. Dapat meningkatkan penjualan produk karena pembayaran menggunakan QRIS lebih mudah
3. *Modern*
 4. Efisiensi waktu sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama
 5. Tidak repot menyiapkan uang kembalian

2.1.5. Kelemahan Uang Elektronik (*E-Money, E-Wallet, dan M-Banking*)

- a. Kelemahan *e-money*:
 1. Ketergantungan pada teknologi
 2. Kurangnya penyedia jasa *e-money*
 3. Adanya biaya admin
- b. Kelemahan *e-wallet*:
 1. Kurangnya penyedia jasa *e-wallet*
 2. Biasanya terjadi kegagalan transaksi
 3. Adanya biaya admin
- c. Kelemahan *m-banking*:
 1. Sering akan penipuan
 2. Memerlukan koneksi internet yang stabil
 3. Adanya biaya admin



2.1.6. Keputusan Penggunaan Uang Elektronik Berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

(Mihadi dkk, 2019) menjelaskan bahwa keputusan mempertimbangkan kemudahan dan kecepatan transaksi melalui pemindaian *QR code*, serta fitur keamanan yang mengurangi risiko penipuan. QRIS juga mendukung inklusi keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan akses terjangkau ke pembayaran digital. Dengan dukungan dari Bank Indonesia dan fleksibilitas untuk berbagai transaksi, QRIS menjadi pilihan strategis untuk efisiensi transaksi dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

2.1.7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) mendefinisikan UMKM adalah kategori usaha yang memiliki skala kecil dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian. Akan tetapi definisi ini dapat berbeda tergantung pada negara masing-masing.

Menurut (Sukirno, 2004), UMKM adalah usaha yang memiliki modal awal atau nilai aset yang kecil serta jumlah pekerja yang terbatas. Besaran modal (aset) atau jumlah pekerja ini sesuai dengan definisi yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga lain untuk tujuan tertentu.

Dari definisi UMKM yang dikemukakan oleh berbagai sumber, UMKM didefinisikan sebagai usaha berskala kecil yang berperan penting dalam perekonomian, meskipun definisinya dapat berbeda di setiap negara. Menurut (Sukirno, 2004), UMKM memiliki modal atau aset kecil serta jumlah pekerja terbatas,



dengan ukuran yang ditentukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk tujuan tertentu.

2.1.8. Peran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Dalam Peningkatan Transaksi Non-Tunai pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) memiliki peran yang penting dalam meningkatkan transaksi non-tunai di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari para pelaku UMKM, mereka menyatakan bahwa penggunaan QRIS lebih menguntungkan dibandingkan metode pembayaran lainnya, karena:

1. **Memperluas Akses Pembayaran Non-Tunai:** QRIS memungkinkan UMKM untuk menerima pembayaran non-tunai melalui berbagai metode seperti kartu debit, kartu kredit, dan dompet digital. Hal ini memperluas opsi pembayaran bagi pelanggan yang cenderung menggunakan cara pembayaran digital.
2. **Meningkatkan Kemudahan Transaksi:** Dengan QRIS, UMKM dapat menyediakan cara pembayaran yang lebih mudah dan cepat bagi pelanggan. Pelanggan hanya perlu memindai kode QR yang telah disediakan oleh UMKM, tanpa perlu menggunakan uang tunai atau melakukan transaksi yang rumit.
3. **Meminimalkan Risiko Keamanan:** QRIS membantu mengurangi risiko keamanan terkait dengan penanganan uang tunai. UMKM tidak perlu menyimpan jumlah uang tunai yang besar di tempat usaha mereka, yang dapat mengurangi risiko pencurian dan kejahatan terkait.



4. **Efisiensi Operasional:** Dibandingkan dengan sistem pembayaran tradisional seperti mesin *Electronic Data Capture (EDC)*, QRIS memiliki biaya operasional yang lebih rendah. UMKM tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa atau biaya transaksi per bulan seperti pada mesin *Electronic Data Capture (EDC)*.
5. **Memfasilitasi Pencatatan dan Pelaporan Transaksi:** QRIS memungkinkan UMKM untuk mencatat dan melacak transaksi secara digital dengan lebih mudah. Ini mempermudah dalam mengelola keuangan dan membuat laporan transaksi untuk keperluan administrasi dan pelaporan pajak.
6. **Mendorong Adopsi Teknologi Digital:** Dengan menggunakan QRIS, UMKM dapat menunjukkan kesiapan mereka dalam mengadopsi teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini penting untuk menjaga daya saing usaha mereka di era digital ini.
7. **Meningkatkan Pengalaman Pelanggan:** QRIS dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan metode pembayaran yang lebih modern dan praktis. Ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan terhadap usaha UMKM.

Secara keseluruhan, QRIS tidak hanya memfasilitasi transaksi pembayaran non-tunai di UMKM, tetapi juga memberikan berbagai manfaat strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional, keamanan transaksi, dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.



2.1.9. Technology Acceptance Model (TAM)

Davis melakukan penelitian pada tahun 1986 dengan mengadaptasi *theory of reasoned action*. Tahun 1989, Davis menerbitkan penelitiannya dalam jurnal MIS Quarterly dengan mengusulkan *theory acceptance model* yang menekankan persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan terkait dengan memprediksi sikap terhadap penggunaan sistem informasi. TAM ialah teori yang mengkaji proses adopsi teknologi informasi dengan menggunakan pendekatan *behavioral theory* (teori perilaku). TAM mendefinisikan bahwa yang menjadi pengaruh penerimaan penggunaan teknologi adalah dua faktor yaitu persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kebermanfaatan teknologi.

Menurut Jogiyanto (2007) teori TAM memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut.

1. TAM adalah model perilaku (*behavior*) yang berguna untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi informasi yang gagal diimplementasikan karena pemakainya tidak memiliki minat untuk menggunakannya.
2. TAM dibangun atas dasar teori yang kuat.
3. Banyak penelitian telah menguji TAM dan hasilnya sebagian besar mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM adalah model yang baik.
4. TAM adalah model yang persimoni (*parsimonius*) yaitu model yang sederhana namun valid.



2.2. Tinjauan Empirik

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis implementasi pembayaran pajak menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Berdasarkan hasil penelitian (Riani B. & Sony H., 2022) mengungkapkan bahwa PPh final UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun saat ini kontribusinya masih rendah karena banyak pelaku UMKM tidak patuh dalam membayar pajak, bukan karena mereka menolak tetapi karena kompleksitas administrasi perpajakan. Solusi yang diusulkan adalah memanfaatkan QRIS untuk otomatisasi pemotongan pajak UMKM, memungkinkan kontribusi pajak mereka langsung masuk ke kas negara dengan lebih efisien.

Berdasarkan hasil penelitian (Santika Alis dkk, 2022) mengungkapkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa beberapa pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya telah menerapkan sistem pembayaran QRIS. QRIS membantu UMKM dalam proses transaksi dengan lebih mudah dan praktis. Pelaku UMKM memiliki persepsi positif terhadap QRIS, didorong oleh manfaat yang dirasakan, kemudahan penggunaan, serta risiko yang dianggap rendah.

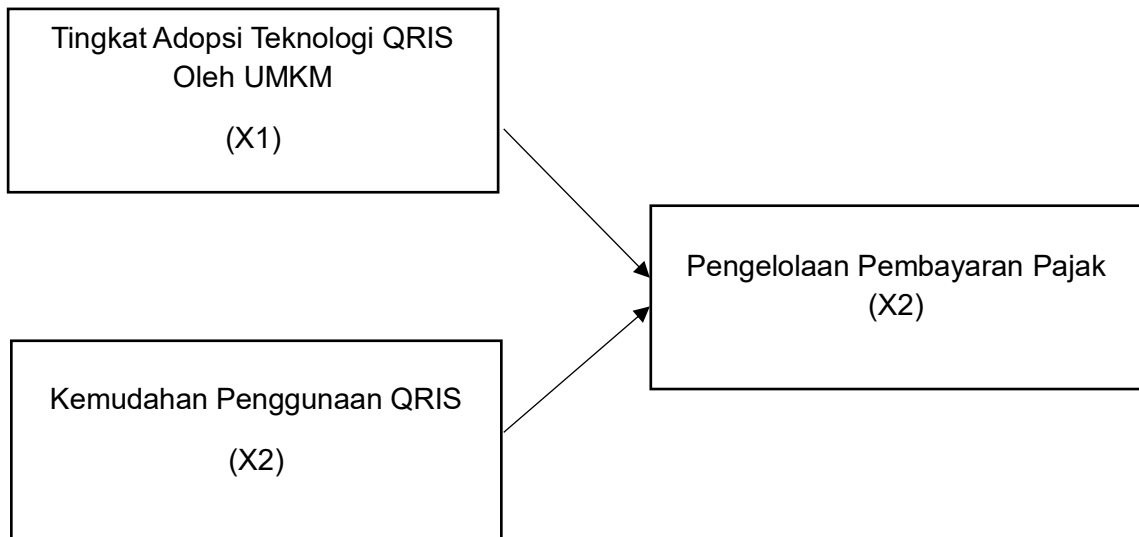
Berdasarkan hasil penelitian (Fanny Nurhaliza dkk, 2023) mengungkapkan bahwa Penerapan QRIS memberikan dampak positif signifikan pada transaksi bisnis digital UMKM di Indonesia. QRIS memfasilitasi transaksi non-tunai yang meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pembayaran elektronik, serta

UMKM meningkatkan pendapatan sehari-hari. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan seperti tingginya tingkat diskon perdagangan (MDR) dan keterbatasan



infrastruktur TI perlu diatasi untuk memperluas adopsi QRIS di kalangan UMKM secara lebih luas dan berkelanjutan.

2.3. Kerangka Pemikiran



2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Implementasi QRIS Terhadap Kepatuhan UMKM Dalam Pengelolaan Pembayaran Pajak

Menurut (Wildan, 2020) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menargetkan 700 ribu wajib pajak yang membayar PBB di bawah 2 juta rupiah akan menggunakan QRIS dalam proses pembayarannya dengan potensi penerimaan senilai 587 miliar. Tidak hanya kota besar seperti Jakarta saja yang mengimplementasikan QRIS dalam pembayaran pajak daerahnya, kota kecil seperti Blora di Jawa Tengah, baru-baru ini juga mengadopsi QRIS untuk pembayaran pajak

an PBB P2 (Pemkab Blora, 2020).



Teknologi sistem informasi khususnya di sektor keuangan sudah memberikan dampak positif yang cukup nyata dalam pemungutan pajak dapat dilihat pada bidang pasar modal. Sebagai contoh adalah pengenaan pajak final 0,1% atas nilai transaksi pada penjualan saham di bursa. Wajib pajak, dalam hal ini investor yang melakukan penjualan saham, tidak perlu repot-repot menghitung ataupun membayar sendiri pajaknya. Pajak sudah terpotong otomatis oleh sistem transaksi. Pihak sekuritas yang akan membayarkan pajaknya karena pihak sekuritas yang berkewajiban untuk memotongnya. Di sisi lain, tarif sebesar 0,1% tidak terlalu terasa bagi investor. Di satu sisi para wajib pajak tidak terasa atau terbebani dalam membayar pajak, di sisi lainnya mereka telah melakukan kewajiban perpajakannya atas transaksi penjualan saham di bursa secara otomatis.

H_1 : Tingkat adopsi teknologi QRIS berpengaruh negatif terhadap pengelolaan pembayaran pajak

2.4.2. Pengaruh Kemudahan Penggunaan QRIS Terhadap Pengelolaan Pembayaran Pajak

Berbagai kemudahan dan efektivitas pemungutan pajak yang dilaksanakan di pasar modal seharusnya bisa diadopsi dalam penentuan kebijakan PPh Final terhadap UMKM. Pengimplementasian model perpajakan yang telah dilaksanakan di pasar modal, memang tidak dapat langsung diadopsikan atau diimplementasikan 100% untuk pemungutan PPh Final UMKM. Namun, hal itu tentu tidak menjadi halangan untuk dalam penerapannya. Untuk tahap awal kebijakan pemungutan PPh

KM dapat diimplementasikan untuk transaksi yang nontunai.



Berdasarkan hasil penelitian (Mahyuni et al., 2021) secara empiris bahwa selama ini masih ditemukan beberapa kendala dalam penggunaan QRIS yang dialami oleh UMKM. Namun hal tersebut tidak menghalangi minat UMKM untuk menggunakan QRIS dalam transaksi pembayaran. Sejalan dengan penelitian tersebut penelitian (Sihaloho et al., 2020) menunjukkan bahwa QRIS memberikan manfaat bagi pedagang UMKM yaitu pedagang tidak perlu menyediakan banyak QR code, terhindar dari uang palsu, tidak perlu menyediakan uang kembalian, serta membantu UMKM dalam melakukan pencatatan harian. (Sekarsari et al., 2021) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa QRIS memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM salah satunya adalah memberikan alternatif pembayaran yang lebih beragam. Dalam penelitiannya juga diperlukan edukasi literasi keuangan digital untuk mengoptimalkan penggunaan QRIS.

Penerapan QRIS yang membawa banyak manfaat dan kemudahan dalam sistem pembayaran perlu diperhatikan oleh DJP. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan kajian terkait persepsi pelaku UMKM terhadap teknologi QRIS sehingga bisa diketahui seberapa besar potensi QRIS dalam simplifikasi sistem perpajakan UMKM yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM.

H₂ : Kemudahan penggunaan teknologi QRIS berpengaruh positif terhadap pengelolaan pembayaran pajak

